

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ade Mahmud. 2020. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Agus Kasiyanto. 2018. *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2010. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Purnomo. 1982. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Semarang: Undip.
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Direktorat Hukum. 2021. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi: Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Henry Campbell Black. 1990. *Blacks Law Dictionary*. Minesota: West Publishing.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- J.E. Sahetapy. 1978. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesriani Siswosaebroto dan A.A.G. Peter. 1986. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Laporan Tahunan KPK 2019*. 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung.
- Muhammad Taufik. 2014. *Keadilan Substansial, Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nopsianus Max Damping. 2019. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni.
- Roeslan Saleh. 1978. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2020, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rusdi Tompo. 2005. *Ayo Lawan Korupsi*. Makassar: LBH-P21.
- R. Wiyono. 2008. *Pemberantasan Korupsi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Shed Hussein Alatas. 1982. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

- , 1999. *Corruption: its Nature, Causes and Consequence*. Avebury: Aldershot and Broofield.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suhatrizal. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Universitas Medan Area.
- Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Trisno Rahardjo. 2011. *Mediasi, Pradana, Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingannya di Indonesia*. Yogyakarta: Lentera & UMY.
- United Nations. 2009. *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime. Jakarta: UNODC.
- Vito Tanzi. 1994. *Corruption, Govermental Activities, and Markets*, (terjemahan Rober Indrabhakti). Bandung: Bina Cipta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Yudi Kristiana. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Thafa Media.

JURNAL DAN ARTIKEL

- ACFE. *Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations*. Association of Certified Fraud Examiners. 2022. p. 1–96. Diakses pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 11.49 WITA.
- Faisal Rachman Januar. Konstruksi Hukum Tuntutan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas. *Jurnal Lex Lata*. Vol. 4. No. 3.
- M. Arief Amrullah. Korupsi Politik dan Pilkada. *Jurnal Madani*. Vol. VII. No. 2. 2005.
- Nur Fitryani Siregar. Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18. No. 2. 2018.

TI Indonesia. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*, Transparency International Indonesia. Rilis Media. 2023. Diakses pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 11. 54 WITA.

Transparency International. *Corruption Perceptions Index*. 2022. Diakses pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 12.12 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia